

TATA KELOLA OBJEK TAMAN WISATA KULINER DI PANTAI KELAPA LIMA KOTA KUPANG

MANAGEMENT OF CULINARY TOURISM PARK OBJECTS AT KELAPA LIMA BEACH KUPANG CITY

Maria Imelda Soba ^{1*}, Ananias Riyoan Philips Jacob², Alfridus S.D. Dari³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: mariasoba796@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the governance of culinary tourism park objects on Kelapa Lima Beach, and determine the supporting and inhibiting factors in the management of culinary tourism objects in Kelapa Lima Beach Kupang City. This study uses the theory of George Terry with 4 aspects, namely planning, organizing, movement, and supervision. The method used is a qualitative method with purposive sampling techniques. The results of this study explain how the planning carried out by the Ministry of PUPR and the Kupang City Government already has a basis, with the aim of improving the tourism sector and improving the economy of fish traders and fishermen. Government organizing already has a basis for organization related to departmentalization and division of labor, but the organizational structure still does not exist. Some related agencies also did not want to provide answers related to the duties and authorities given. The movement in the management of the culinary park has not been followed up by the government, because the documents for the management of the place are still used as reference material, but for now there have been several tourism events carried out at the culinary park. Supervision is temporarily carried out by the Fisheries Office where the focus is on fish traders and fishermen, the Transportation Office to regulate parking attendants and Civil Service Police for security around the culinary park.

Keyword: Government, Sights, Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan objek wisata kuliner di Pantai Kelapa Lima Kota Kupang. Studi ini menggunakan teori dari George Terry dengan 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Kupang sudah mempunyai dasar, dengan tujuan meningkatkan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian pedagang ikan dan juga nelayan. Pengorganisasian yang dilakukan pemerintah sudah mempunyai dasar untuk organisasi berkaitan dengan departementalisasi dan pembagian kerja, akan tetapi dalam struktur organisasi masih belum ada. Beberapa dinas terkait pun belum mau memberikan jawaban terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Pergerakan dalam pengelolaan taman kuliner tersebut masih belum ditindak lanjuti oleh pemerintah, dikarenakan dokumen untuk pengelolaan tempat tersebut masih dijadikan bahan rujukan, namun untuk sekarang sudah ada beberapa event-event pariwisata yang dilakukan di taman kuliner tersebut. Pengawasan untuk sementara dilakukan oleh Dinas Perikanan yang dimana fokusnya adalah pedagang ikan dan nelayan, Dinas perhubungan untuk menertibkan juru parkir dan Polisi Pamong Praja untuk keamanan sekitar taman kuliner.

Kata kunci: Pemerintahan, Tata Kelola, Objek wisata

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima kota kupang. Perlu adanya perhatian dari pemerintah kota untuk penataan kawasan objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima. Kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, jantung perjuangan modal dan kelas sosial. Dinamika perkembangan kota tidak hanya dipahami sebagai problem internal kota, akan tetapi sebagai problem yang memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik secara nasional dan global. Masalah tata ruang dan tata kelola ruang adalah bagian yang serius dari masalah perkotaan karena ada kekuatan modal global dan lokal yang sangat kuat dan dibutuhkan untuk membangun pusat-pusat perkotaan atau ikon-ikon kota. Kota Kupang adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai ibukota provinsi pastinya

Kota Kupang merupakan kawasan strategis dalam kontestasi kepentingan ekonomi politik nasional, regional, dan global. Dalam konteks regional maupun nasional, saat ini Kota Kupang menjadi fokus pengembangan wilayah. Hal ini termasuk dalam kebijakan tata ruang wilayah nasional yang membuat Kota Kupang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional di kawasan timur Indonesia. Kota kupang bukan hanya kawasan strategis provinsi tetapi juga salah satu kawasan dengan pertumbuhan dan perkembangan tercepat yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan transformasi sosial ekonomi masyarakat yang disusul oleh masifnya dinamika pembangunan infrastruktur. Rencana penataan wilayah pesisir pantai Kelapa Lima telah bermula sejak tahun 2014 lalu, namun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) tidak menyetujuinya.

Mantan Walikota Kupang pada masa itu Jonas Salean, membenarkan bahwa rencana penataan wilayah pantai kelapa lima telah ada sejak tahun 2014. Desain bangunan yang sudah tersedia tidak sesuai dengan reklamasi 100 meter untuk wilayah kuliner karena desain maupun reklamasi tersebut diperuntukkan bagi nelayan agar wilayah jualan ikan lebih luas. Ruang untuk pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi dasar dari rencana reklamasi dengan ukuran minimal 50 meter. Reklamasi dilakukan untuk mendapatkan ruang yang mencukupi bagi para pedagang sebagaimana pembangunan yang sama di Labuan Bajo sekarang ini. Namun BBKSDA tidak merestui rencana itu karena area itu bukan untuk reklamasi. Menurut mantan walikota Kupang Jonas Salean pada masa itu, penataan wilayah tata ruang kota tidak masalah selama tidak mengambil 85% wilayah seperti Kelapa Resto sekarang. Beralihnya jabatan Walikota Kupang kepada Jefri Riwo Kore tiga tahun setelahnya, penataan kawasan pesisir Teluk Kupang terutama Pantai Kelapa Lima dan Pantai LLBK (Lai-Lai Besi Koepan) juga disasar.

Pada tanggal 26 Juni 2021 dilangsungkan penandatanganan kerjasama antara Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Kupang dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang berwenang atas Teluk Kupang, yaitu kerja sama persyaratan pengeluaran izin pengecualian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada kawasan itu. Analisis dampak lingkungan sendiri bertujuan sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibuat. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.81 Milyar oleh pemerintah pusat untuk penataan 3 (tiga) lokasi yakni Kota Lama Kupang, Pantai LLBK, Pantai kelapa Lima dan koridor 3 Jalan Frans Seda. Penandatanganan itu dilakukan di Palacio Ballroom hotel Aston Kupang yang dimana pengerjaannya telah dimulai pada tahun 2020 sebelum seremonial hitam di atas putih itu dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021. Objek wisata kuliner di pantai Kelapa Lima Kota Kupang telah di resmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 guna mendukung pembangunan sektor wisata di Kota Kupang. Berlokasi di tepi pantai, kawasan wisata kuliner

ini cocok bagi para wisatawan yang ingin menyantap hidangan sembari menikmati pemandangan pantai Kelapa Lima. Akan tetapi pengelolaan tempat wisata kuliner tersebut nampaknya belum dikelola secara baik dan akan menimbulkan banyak permasalahan.

Ada beberapa permasalahan yang perlu ditinjau kembali seperti penataan parkir dan juga masyarakat yang berjualan di sekitaran taman wisata tersebut, kemudian bagaimana pemindahan masyarakat yang aslinya adalah penjual ikan pada tempat tersebut yang direlokasi ke wilayah Pasir Panjang, bahkan para pedagang juga membuat lapak-lapak dan tempat panggang ikan baru yang ditempatkan di dekat Gazebo.

Selain itu, fasilitas seperti lampu penerangan juga mulai rusak, lantai Gazebo juga digenangi air. Lapak-lapak ikan tersebut tampak mengganggu keindahan area wisata kuliner yang dibangun dengan anggaran Rp.52 miliar tersebut. Dari permasalahan di atas, apabila dikaitkan dengan perencanaan dari Kementerian PUPR tentang penataan/pengelolaan objek taman wisata kuliner di pantai Kelapa Lima, dampaknya terdapat indikasi ketidaksesuaiannya dengan yang direncanakan. Implementasi yang terjadi adalah objek taman wisata kuliner tersebut dijadikan tempat penjualan ikan. Sebelum pembangunan tempat objek wisata taman kuliner dibangun, pemerintah setempat dampaknya juga tidak melakukan diskusi awal yang intensif dengan para pedagang sehingga ada beberapa pedagang yang sama sekali merasa keberatan dan tidak menyetujui adanya pembangunan tempat tersebut. Pemerintah Kota Kupang juga tidak sepakat dengan wacana pengelolaan tempat tersebut diberikan kepada Asosiasi atau pihak ke-3 karena jika diserahkan pada Asosiasi Penjual Ikan dan kuliner, maka akan terjadi permasalahan internal dan bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Metode

Penulis menjelaskan secara terperinci bukan hanya jenis penelitian tetapi juga desain penelitian baik desain penelitian kuantitatif maupun desain penelitian kualitatif. Selanjutnya diuraikan juga lokasi dan waktu spesifik pengambilan data/pengukuran variabel penelitian dilakukan. Bagian-bagian selanjutnya yang perlu dideskripsikan adalah variabel-variabel penelitian (*penelitian kuantitatif: independen dan dependen; penelitian kualitatif: area/fokus penelitian*), definisi (*penelitian kuantitatif: definisi operasional dan kriteria objektif; penelitian kualitatif: definisi istilah/konsep*), jumlah populasi dan besar sampel (*penelitian kualitatif: subjek penelitian/informan*), teknik pengambilan sampel, cara pengambilan data, pengolahan dan teknik statistik (kuantitatif) dan teknik non statistik (kualitatif) yang digunakan dalam proses analisis data. Sertakan juga teknik-teknik yang digunakan untuk menjamin *validitas* dan *reliabilitas* pengukuran variabel baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Hindari menuliskan definisi secara teoritis dengan menggunakan referensi pada bagian ini. Penjelasan tentang variabel dan instrumen serta cara pengukurannya.

Hasil

Pengelolaan Taman Wisata Kuliner di Kota Kupang sejauh ini belum ada titik terangnya. Tempat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada April 2022 itu hingga kini seolah tidak bertuan. Pengelolaan kawasan tersebut masih mengambang karena belum ada penyerahan resmi dari Kementerian PUPR. Pemerintahan Kota Kupang mulai menertibkan para pedagang ikan di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Hingga saat ini bangunan tersebut belum secara resmi diserahkan oleh Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang mulai bertugas melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban di lokasi Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima Kota Kupang. Penertiban ini sebagai tindak lanjut dari pengelolaan sementara yang diberikan BPPW terhadap Pemerintah Kota Kupang.

Sebelum terjadinya penertiban, sudah ada pendekatan Pemerintah Kota Kupang bersama pedagang sehingga tidak terjadinya penolakan warga saat penertiban. Dinas Perhubungan juga telah menertibkan para juru parkir, sehingga parkir tidak diperbolehkan berada di atas atau area taman melainkan di arahkan ke area jogging track (di belakang Hotel On The Rock).

Pembahasan

Perencanaan berhubungan erat dengan manajemen. Suatu rencana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang ditentukan sebelum melakukan berbagai kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga dapat dikatakan tindakan yang menyeluruh yang berusaha mengoptimalkan dana dari suatu sistem. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kota Kupang tengah bersolek. Hampir di setiap sudut kota tampak ada pembangunan. Beberapa diantaranya adalah kegiatan Penataan Kawasan Kota Kupang oleh Kementerian PUPR. Penataan kawasan Kota Kupang dikerjakan secara bertahap dengan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pariwisata yang lebih baik, sekaligus mendorong pengembangan destinasi wisata bahari kebanggaan masyarakat Kota Kupang. Kegiatan penataan kawasan Kota Kupang tahap 1, Direktorat Jendral Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) mewujudkan komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah hingga tercipta ruang Kota Kupang yang lebih baik dan berkualitas. Kawasan Kelapa Lima merupakan sentra penjualan ikan bagi masyarakat setempat dan secara eksisting telah memiliki promenade(jalan-jalan).

Skenario penataan kawasan dengan menata PKL dan mengembalikan View ke arah pantai serta memaksimalkan ruang terbuka publik. Menurut George Terry perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Tujuan pembangunan taman kuliner di Pantai Kelapa Lima yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu adalah meningkatkan sektor pariwisata di Kota Kupang, dan meningkatkan perekonomian pedagang-pedagang ikan dan nelayan. Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Kupang sudah menerapkan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut teori tersebut. Dinas Pariwisata Kota Kupang siap mengelola dan menghadirkan beberapa event-event pariwisata seperti Pesparani, malam minggu asyik dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Akan tetapi masih ada yang kurang maksimal, dalam hal ini adalah pengelolaan yang belum baik dan sesuai. Diharapkan agar pihak pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada sehingga apa yang direncanakan dapat kembali terlaksanakan.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Kupang sudah punya dasar untuk sebuah organisasi berkaitan dengan departementalisasi dan pembagian kerja, akan tetapi dalam struktur organisasi masih belum ada sebagaimana yang dikatakan oleh Terry. Struktur organisasi dapat

didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Dari aspek pengorganisasian, pengelolaan untuk sementara dilakukan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan dan Pol PP yang dimana mempunyai wewenang untuk para pedagang ikan, dan juga menjaga ketertiban yang ada di kawasan taman tersebut. Adapun beberapa dinas-dinas yang terkait masih belum memberikan jawaban terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan dikarenakan belum adanya tindak lanjut dari koordinator Asisten 2 Walikota Kupang.

Pergerakan (Actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota dalam sebuah kelompok kerja, sehingga mereka memiliki keinginan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan serta sasaran-sasaran yang diinginkan anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Hal mendasar dalam pergerakan adalah manajemen yang berpandangan progresif, maksudnya para manajer harus menunjukkan sikap teladan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian terhadap anggota-anggota yang ada di dalam suatu lembaga. Dalam hal ini pergerakan lebih ditujukan tentang bagaimana seorang pimpinan lembaga atau manajer bisa menggerakkan kepengurusannya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Menurut George Terry pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Untuk mencapai kesuksesan dalam pergerakan seseorang harus senantiasa berpikir objektif dalam setiap mengambil sikap, pergerakan kali ini belum sesuai dengan yang dikatakan Terry. Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa untuk pergerakan atau pelaksanaan dalam pengelolaan Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima masih belum jelas, dikarenakan dokumen untuk pengelolaan tempat tersebut masih dijadikan bahan rujukan, pemerintah masih belum menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan perencanaan. Pihak pemerintah baru hanya melakukan beberapa event-event pariwisata. Diharapkan untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Kota Kupang bisa melakukan upaya yang lebih baik dalam hal pengelolaan Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima agar bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan bisa lebih sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah pengelolaan pasti ada kekeliruan maupun kegagalan-kegagalan serta petunjuk-petunjuk yang tidak efektif. Menurut George Terry pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan melakukan evaluasi dari penyimpangan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan Objek Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Terry. Pengawasan tersebut rupanya tidak terlepas dari campur tangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. Sebelum adanya pembangunan taman wisata tersebut, pihak pemerintah sudah melakukan kesepakatan bersama dengan para pedagang ikan yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Ikan Kota Kupang (APIK). Setelah mantan Walikota Jefry Riwu Kore melepas masa jabatannya, banyak permasalahan yang mulai timbul. Salah satunya pengelolaan wisata kuliner di Pantai Kelapa Lima. Hal ini terlihat ketika Dinas tersebut terkesan membiarkan pedagang lain berjualan di luar lokasi, sedangkan mereka telah bersepakat untuk berjualan di lapak yang sudah tersedia. Selain itu, Dinas Perikanan Dan

Kelautan Kota Kupang telah menolak APIK agar tidak terlibat, sementara APIK sudah berperan mulai dari mengusulkan lokasi itu untuk dibangun. Adapun APIK ikut terlibat dalam diskusi-diskusi rencana pembangunan wisata, karena APIK yang beranggotakan pedagang dan nelayan Kelapa Lima bakal dijadikan penggerak wisata kuliner nantinya. Pengawasan dari Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, sudah melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang timbul. Dalam penertiban tersebut, semua pedagang membongkar lapak yang dipasang di area taman, lebih tepatnya di luar gazebo yang awalnya sudah ditetapkan sebagai area pedagang. Para pedagang ikan dan kuliner tersebut dipindahkan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dinas perhubungan bertugas untuk menertibkan para juru parkir sehingga parkir tidak diperbolehkan berada di atas atau di area taman.

Kesimpulan

Salah satu bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat Kota Kupang adalah dengan dibangunnya kawasan wisata Kelapa Lima guna mendukung sektor pariwisata. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan taman wisata dikarenakan masyarakat bisa ikut bergabung dalam perayaan event-event wisata seperti etnis budaya dan bisa menjadi lokasi hiburan bagi masyarakat Kota Kupang. Belum semua pedagang ikan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner, dikarenakan kerja sama antara pemerintah dengan pedagang ikan yang awalnya sudah disetujui namun setelah itu pemerintah melakukan penolakan terhadap pedagang ikan agar tidak ikut dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner tersebut. Komunikasi sangatlah penting dalam sebuah kerja sama; dalam hal ini komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dengan pedagang ikan masih sangat kurang baik yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner. Pihak pemerintah sampai sekarang belum mau memberikan tanggapan terkait dengan pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang baik bagi individu atau kelompok. Belum ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah sama sekali. Pengelolaan kawasan ini masih mengambang karena terkait dengan surat penyerahan resmi. Pada awalnya pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, PD pasar pernah melakukan pembersihan namun akhirnya tidak lagi melakukan pengelolaan karena adanya tarik ulur di Pemkot Kupang perihal pengelolaan. Transparansi merupakan aspek dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan keterbukaan dan kemudahan akses serta melibatkan para pedagang ikan dan nelayan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sampai sekarang belum ada keterbukaan dari pihak pemerintah terkait pengelolaan objek taman wisata kuliner tersebut terhadap masyarakat (APIK). Kesepakatan sebelumnya adalah APIK harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan tersebut, namun pada akhirnya APIK tidak dilibatkan. Komisi II DPRD Kota Kupang meminta agar Pemkot segera memiliki perencanaan terkait pemanfaatan kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar saat dilakukan serah terima maka pengelolaan kawasan tersebut tidak menjadi kisruh antara pemerintah dan masyarakat. Komisi II DPRD juga meminta kepada masyarakat agar bersabar menunggu sampai segala proses penyerahan aset selesai.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta
Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta Rajawali Pers

- Agus Dwiyanto. (2008). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, cet. III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Damanik, Janianton. (2012). Manajemen destinasi pariwisata: sebuah pengantar ringkas. Yogyakarta: Kepel Press
- Hakim, L. (2013). Problem Demokratisasi Dan Good Governance di Era Reformasi. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya. Malang
- Krina L.P.L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. (2007). Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kreasti
- Andini, R., M.J. Amin, dan L. Dyastri. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan 5(4): 1571-1582
- Heryana, Toni, and Sari Kartika Dewi. (2013). "Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur." Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
- Jayudi, A. (2015). Studi Pemanfaatan Ruang Objek Wisata Pantai Barane Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Junaid, Ilham dan Muh. Arfin M. Salim (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Volume 1, No.1. Politeknik Pariwisata Makassar
- Lutpi, Hakkiatul. (2016). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Di Kecamatan Jerowaru. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.
- Muhamad, N. (2020). Studi Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Pantai Gading Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekar Bela Kota Mataram (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).